

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Eka Puteri Ardianti

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: eradimensiarch@gmail.com

Abstract

This study aims to find out more about the influence of the implementation of good governance, regional financial accounting system, and utilization of information technology to the quality of local government financial statements, given the quality of financial statements can build public confidence in the performance of local governments. The data used in this study are primary data form the results of questionnaires. Respondents in this study are structural officials and officials who perform the functions of accounting / financial administration in each of the Gunungkidul district. The questionnaires was distributed to 45 respondents and data that can be processed as many as 43 questionnaires. The sampling method using Purposive Sampling. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression techniques. Results of regression analysis shows that the implementation of good governance does not affect the quality of financial statements of the local government of Gunungkidul district while the regional financial accounting system and utilization of information technology affect the quality of local government financial statements Gunungkidul district.

Keywords: *Implementation of Good Governance, Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology, and Quality of Local Government Financial Statement*

PENDAHULUAN

Memasuki era informasi ini perkembangan dalam sektor publik menjadi perhatian baik dari kalangan masyarakat maupun instansi terkait. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintah atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya (Nurillah, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan

keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi (Kantu, Noholo, & Valentina, 2015) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti halnya dengan penerapan *Good Governance*. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kantu et al., 2015) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (Maryani, 2014) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Artinya bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan yang ada dipemerintahan. Sistem Akuntansi Keuangan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintahan daerah diatur dengan perautran gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2015) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan (Ihsanti, 2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain penerapan *good governance* dan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya (Nurillah, 2014). Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal (Wardani & Andriyani, 2017). Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (Wardani & Marlinawati, 2018). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Penelitian dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh (Nadir & Hasyim, 2017) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah kabupaten Barru, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Ketidaksignifikan-an penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) kemungkinan disebabkan oleh teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya banyak, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia, mahal namun tidak dapat mendukung kehandalan penyajian laporan keuangan. Penelitian lain yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa dilakukan oleh (Wardani & Marlinawati, 2018).

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan (Yogyakarta.bpk.go.id). Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

“Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dari semua pihak. Untuk pertama kalinya, Gunungkidul mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, ini merupakan sebuah kebanggaan, dan pekerjaan rumah buat kami untuk dapat terus mempertahankannya,” ujar Bupati Gunungkidul, Badingah, (Jogja.Uri.co.id, Senin, 30 Mei2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen yaitu penerapan *good governance*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Gunungkidul).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Maryani, 2014) berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan *good governance* masih sering terjadi di Indonesia, seperti petinggi pemerintahan yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas, penyajian laporan keuangan yang kurang akurat, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, serta pertanggung jawaban atas setiap aktivitas masih lemah. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi antara entitas pemerintah terhadap masyarakat luas, sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan seperti korupsi yang semakin marak. Berdasarkan penelitian terdahulu (Kantu et al., 2015) dan (Maryani, 2014) menunjukkan bahwa variabel penerapan *good governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

H₁: penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki system akuntansi yang handal. Berdasarkan penelitian terdahulu (Ihsanti, 2014) menunjukkan hasil bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2015) menunjukkan hasil secara parsial sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

H₂: sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Haza, 2014) teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal (Wardani & Andriyani, 2017). Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (Wardani & Marlinawati, 2018). Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu (Nadir & Hasyim, 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan

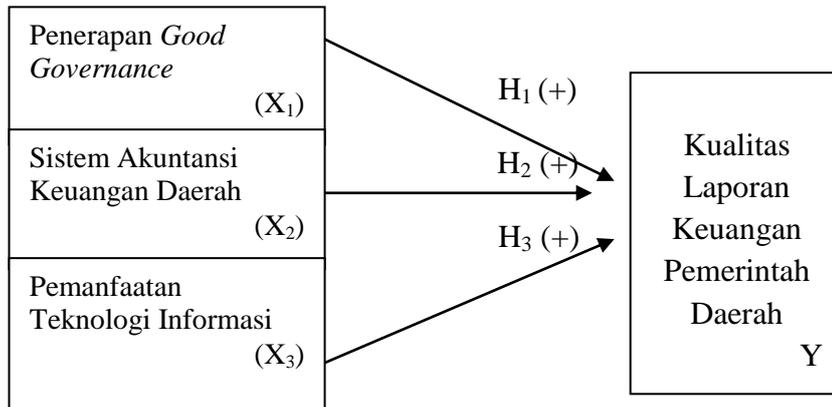
H₃: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kerangka Pemikiran

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan *good governance*, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. *Good governance* merupakan peran pemerintah yang baik dalam mengelola keuangan daerah.

Pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun LKPD sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan baik sarana maupun prasarana pengelolaan keuangan daerah selain dari bentuk yang dituangkan SAP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah, 2014).

Model Penelitian.



METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul*”. Sifat penelitian ini termasuk penelitian kausatif karena meneliti sebab akibat.

Definisi Operasional dan Indikator

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan *good governance*, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Penerapan Good Governance

Penerapan *good governance*, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*) (Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000; 6).

Tabel 1

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
a. Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas menyediakan informasi yang material dan relevan kepada seluruh pemilik kepentingan (stakeholder maupun stockholder). 2. Para pemilik kepentingan dapat mengakses dengan mudah setiap informasi yang dibutuhkan (dalam batasan Undang-undang).
b. Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas sudah menetapkan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dan kepada karyawan secara rinci dan jelas. 2. Seluruh elemen dalam dinas sudah selaras dengan visi, misi, sasaran, dan strategi dinas.
c. Responsibility	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas selalu memberikan perhatian kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar. 2. Dinas menerapkan sistem AMDAL. 3. Dinas sering mengadakan Corporate Social Responsibility (CSR)
d. Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kebijakan dan keputusan dinas di dominasi oleh segelintir orang 2. Pengambilan setiap keputusan dilakukan secara objektif
e. Kesetaraan dan Kewajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap bagian dari dinas dapat menyampaikan pendapat terhadap kepentingan dinas. 2. Dinas memperlakukan semua bagian dari dinas secara wajar sesuai dengan porsinya masing-masing.

b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Tabel 2

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
a. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan SAP	1. Sistem Akuntansi Keuangan Pada Dinas ini Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Prosedur Pencatatan Akuntansi dengan Pencatatan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum	1. Setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi. 2. Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan 3. Setiap transaksi keuangan pada dinas ini didukung oleh bukti transaksi. 4. Pada Dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.
c. Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik	1. Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya. 2. Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan. 3. Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi. 4. Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic 5. Transaksi pada dinas ini tidak dilakukan klasifikasi sesuai dengan pos-pos yang semestinya.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya (Nurillah, 2014:11). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Tabel 3

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
a. Komputer	1. Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas. 2. Pengolahan data transaksi keuangan di instansi/lembaga tempat saya bekerja menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan. 3. Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur. 4. Ditempat saya bekerja proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi. 5. Ditempat saya bekerja telah menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur. 6. Ditempat saya bekerja telah melaksanakan

	pendataan terhadap komputer yang telah usang tepat pada waktunya
b. Jaringan Internet	1. Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan

d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Nurillah, 2014).

Tabel 4

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
a. Relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu 2. Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap
b. Andal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan 2. Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material 3. Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus 4. Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji
c. Dapat Dibandingkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 2. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
d. Dapat Dipahami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna 2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna 3. Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyediakan informasi keuangan yang sulit dipahami oleh pengguna informasi keuangan

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kabupaten Gunungkidul di lingkup dinas terutama yang berkewenangan mengelola laporan keuangan. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu: 1) Pejabat struktural

dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas, 2) Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner peneliti dinyatakan valid. Hal ini karena hasil r hitung lebih besar dari r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronchbach's Alpha* lebih besar dari 0.600.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model yang *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009:160). Hasil uji normalitas akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		43
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.31978802
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.072
	<i>Positif</i>	.061
	<i>Negative</i>	-.072
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.475
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.978

a. *Test distribution is Normal.*

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebesar 0.978, yang berarti data dinyatakan normal karena di atas nilai alpha sebesar 0,05 / 5%.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2009:105). Hasil uji multikolonieritas akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Uji Multikolonieritas

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	.832	4.380		.190	.850		
	Penerapan Good Governance Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi	.171	.099	.175	1.719	.094	.637	1.569
		.378	.131	.349	2.888	.006	.454	2.204
		.708	.208	.450	3.404	.002	.380	2.634

a. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolonieritas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,1. Variabel independen antara lain Penerapan *Good Governance* memiliki nilai *tolerance* 0,637, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,454, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,380.

Selain dengan menggunakan acuan nilai *tolerance* dapat dibuktikan dengan menggunakan nilai *variance inflation factor (VIF)* dengan nilai dibawah 10. Pada variabel Penerapan *Good Governance* memiliki nilai *VIF* ,569, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai *VIF* sebesar 2,204, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai *VIF* sebesar 2,634.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.210	2.483		-890	.379
Penerapan Good Governance Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi	.001	.056	.003	.014	.989
	.070	.074	.216	.946	.350
	.033	.118	.071	.283	.778

a. *Dependent Variable: AbsRes_1*

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan data bersifat homogen. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi lebih dari alpha dengan nilai alpha sebesar 0,05 atau 5%. apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas dan data bersifat homogen. Berdasarkan tabel tersebut variabel Penerapan *Good Governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,989, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,350, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,778.

Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 1
Uji Statistik F
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	647.143	3	215.714	37.222	.000 ^a
	Residual	226.019	39	5.795		
	Total	873.163	42			

- a. *Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi*
 b. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
 Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil uji statistik f diatas terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 37,222. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 dan nilai F hitung 37,222 lebih besar dari F tabel sebesar 2,87. Artinya bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.861	.741	.721	2.40736

- a. *Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi*
 b. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
 Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas terdapat nilai *adjusted R square* sebesar 0,721 yang berarti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi 72,1% oleh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Tabel 3
Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.832	4.380		.190	.850
Penerapan Good Governance Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi	.171	.099	.175	1.719	.094
	.378	.131	.349	2.888	.006
	.708	.208	.450	3.404	.002

a. *Dependent Variable:* Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas maka dihasilkan persamaan linier sebagai berikut:
 $Y = 0,832 + 0,7X + 0,378X_2 + 0,708X_3 + \varepsilon$

a. Hipotesis 1: Penerapan *Good Governance* (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel penerapan *good governance* (X₁) nilai tingkat signifikan sebesar 0.94 yang artinya diatas derajat kepercayaan sebesar 0.05 dan nilai t hitung sebesar 1.719 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,68107. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diketahui nilai koefisien regresi penerapan *good governance* 0,7 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan penerapan good governace, sedangkan variabel lain konstan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,7 satuan.

b. Hipotesis 2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X₂) nilai tingkat signifikan sebesar 0.006 yang artinya dibawah derajat kepercayaan sebesar 0.05 dan nilai t hitung sebesar 2.888 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,68107. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diketahui nilai koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,378 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sedangkan variabel lain konstan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,378 satuan.

c. Hipotesis 3: Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) nilai tingkat signifikan sebesar 0.002 yang artinya dibawah derajat kepercayaan sebesar 0.05 dan nilai t hitung sebesar 3.404 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,68107. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diketahui nilai koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,708 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan variabel lain konstan maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,708.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian terdapat hal yang menyebabkan penerapan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul yaitu beberapa dinas kabupaten Gunungkidul belum menerapkan prinsip-prinsip dan praktik *good governance*. Beberapa dinas belum pernah mengadakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan kurang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dinas diluar kegiatan yang bersifat pemerintahan.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian serangkaian prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat di dinas kabupaten Gunungkidul sudah dimanfaatkan dan diterapkan secara optimal. Analisis transaksi, pengklasifikasian, dan pencatatan transaksi pada laporan keuangan dinas dilakukan secara semestinya dan didukung dengan bukti-bukti transaksi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di dinas kabupaten Gunungkidul telah dilakukan dengan baik. Penggunaan komputer sebagai teknologi informasi dan *software* sebagai pengolahan data transaksi keuangan dimanfaatkan dengan baik didukung dengan penggunaan jaringan internet yang tersedia sehingga memudahkan pengolahan laporan keuangan dan pengiriman data ke pihak lain apabila dibutuhkan.

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal.
2. Peneliti dapat menambahkan populasi responden agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian.
3. Para penyusun laporan keuangan yang ditugaskan dalam tiap-tiap Dinas memiliki latar pendidikan yang berbeda-beda (tidak hanya berasal dari latar belakang akuntansi) sehingga kurang memahami tugasnya dalam menyusun laporan keuangan, oleh karena itu hendaknya kepala bagian keuangan memebrikan pembekalan terlebih dahulu agar pengelola laporan keuangan lebih bisa memahami tugasnya.
4. Pengelola laporan keuangan harus lebih bisa mendalami apa yang telah menjadi tugasnya sehingga kualitas yang dihasilkan dapat bermanfaat dan memiliki kualitas maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Haza, I. I. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang).
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Kantu, M., Noholo, S., & Valentina, H. J. (2015). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo). *Universitas Negeri Gorontalo*, 1–13.
- Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, E. S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Maryani, N. I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dppkd) Kabupaten Bintan). *Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1–29.
- Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia , terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57–68.
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi*

Empiris Pada Skpd Kota Depok). Universitas Diponegoro.

- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.
- Wardani, D. K., & Marlinawati. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2).